

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan pada hakikatnya tidak hanya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam aspek intelektual, tetapi juga membangun manusia yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat. Di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), fase perkembangan peserta didik berada pada masa transisi dari anak menuju remaja yang sarat dengan dinamika psikologis, sosial, dan moral. Pada fase ini, penguatan karakter menjadi kebutuhan mendesak agar peserta didik mampu menyaring pengaruh lingkungan, teknologi, dan pergaulan yang semakin kompleks. Dalam konteks tersebut, kepala sekolah memegang peranan strategis sebagai pemimpin pendidikan yang memiliki kewenangan dalam merumuskan, menetapkan, dan memperkuat regulasi kebijakan sekolah sebagai instrumen pembentukan karakter. Oleh karena itu, penguatan regulasi kebijakan kepala sekolah dalam membangun karakter peserta didik di SMP menjadi isu penting yang perlu dikaji secara mendalam.

Secara filosofis, pendidikan karakter berakar pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki potensi moral yang harus dikembangkan secara sadar dan sistematis. Filsafat pendidikan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila menempatkan pembentukan karakter sebagai tujuan fundamental pendidikan. Pendidikan tidak semata-mata mentransfer ilmu pengetahuan,

melainkan juga menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, gotong royong, dan religiusitas. Dalam perspektif ini, regulasi kebijakan sekolah bukan sekadar aturan administratif, tetapi merupakan manifestasi nilai-nilai filosofis yang dijabarkan dalam tata tertib, budaya sekolah, dan program pembiasaan. Kepala sekolah berperan menerjemahkan nilai-nilai filosofis tersebut ke dalam kebijakan konkret yang membangun kultur sekolah berkarakter.

Pendidikan karakter sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan regulasi kebijakan kepala sekolah dalam membangun karakter peserta didik di SMP tidak berdiri sendiri, melainkan berlandaskan pada kerangka normatif yang telah ditetapkan oleh negara. Aspek regulasi ini menjadi pijakan yuridis sekaligus legitimasi formal bagi kepala sekolah dalam merumuskan, menetapkan, serta menegakkan kebijakan sekolah yang berorientasi pada pembentukan karakter.

Pertama, dasar hukum utama pendidikan nasional tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 3 ditegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membangun watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Rumusan tersebut secara eksplisit menempatkan pembentukan watak atau karakter sebagai tujuan fundamental pendidikan. Artinya, setiap satuan pendidikan, termasuk SMP, memiliki kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi akademik, tetapi juga pembinaan karakter peserta didik. Kepala sekolah sebagai

penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan memiliki legitimasi hukum untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pencapaian fungsi tersebut.

Kedua, penguatan karakter juga diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Peraturan ini menegaskan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dilaksanakan melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, serta masyarakat. Dalam konteks ini, kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pengendali kebijakan internal sekolah untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam kurikulum, kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Regulasi ini memberikan dasar normatif bagi kepala sekolah untuk menyusun tata tertib, program pembiasaan, serta mekanisme evaluasi yang mendukung pendidikan karakter secara sistematis.

Ketiga, ketentuan mengenai standar pengelolaan pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang merupakan turunan dari kebijakan pendidikan terbaru. Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, termasuk pembentukan karakter. Standar pengelolaan tersebut mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan, serta evaluasi yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Dengan demikian, penguatan regulasi kebijakan kepala sekolah dalam membangun karakter peserta didik memiliki landasan hukum dalam aspek manajerial dan tata kelola sekolah.

Keempat, dalam kerangka implementasi kurikulum, kebijakan terbaru melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendikbudristek serta kebijakan kurikulum yang menekankan Profil Pelajar Pancasila, semakin mempertegas bahwa pengembangan karakter merupakan prioritas nasional. Profil Pelajar Pancasila yang meliputi dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, menjadi arah kebijakan yang harus diterjemahkan oleh kepala sekolah dalam bentuk regulasi operasional di tingkat SMP.

Dengan demikian Pendidikan karakter pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi fondasi penting dalam membangun kepribadian peserta didik pada fase remaja awal. Pada tahap perkembangan ini, peserta didik berada dalam masa transisi yang ditandai dengan pencarian jati diri, perkembangan emosi yang dinamis, serta kebutuhan akan arahan nilai yang jelas. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dituntut tidak hanya menyelenggarakan pembelajaran akademik, tetapi juga membangun sistem regulasi yang kuat guna menanamkan nilai-nilai karakter secara terstruktur dan berkelanjutan.

Secara konseptual, pendidikan karakter merupakan proses sistematis dalam menanamkan nilai moral dan etika melalui pembiasaan, keteladanan, serta penegakan aturan yang konsisten. Menurut Daryanto (2021: 5), pendidikan karakter di sekolah harus dilaksanakan melalui integrasi kurikulum, budaya sekolah, dan kebijakan yang mendukung internalisasi nilai. Hal ini menunjukkan

bahwa kebijakan kepala sekolah memegang peran strategis dalam memastikan nilai karakter tidak hanya diajarkan, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

Dalam perspektif kepemimpinan pendidikan, kepala sekolah memiliki kewenangan dalam merumuskan dan memperkuat regulasi yang menjadi pedoman perilaku seluruh warga sekolah. Menurut Danim (2022: 112), kepemimpinan kepala sekolah yang efektif tercermin dari kemampuannya membangun sistem tata kelola sekolah yang berbasis nilai dan berorientasi pada pembentukan karakter. Regulasi yang kuat akan menciptakan kepastian norma serta membangun iklim sekolah yang disiplin dan kondusif.

Penguatan regulasi kebijakan juga berkaitan dengan fungsi manajerial kepala sekolah dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Menurut Usman (2021: 87), kepala sekolah sebagai manajer pendidikan bertanggung jawab menyusun kebijakan operasional yang selaras dengan visi sekolah, termasuk kebijakan pembinaan karakter peserta didik. Regulasi yang dirancang secara partisipatif dan berbasis kebutuhan akan meningkatkan efektivitas implementasi serta memperkuat komitmen seluruh warga sekolah.

Lebih lanjut, pembentukan karakter tidak dapat dilepaskan dari budaya sekolah. Menurut Gunawan (2021:134), budaya sekolah terbentuk melalui konsistensi penerapan aturan, keteladanan pemimpin, dan pembiasaan nilai dalam aktivitas harian. Apabila regulasi kebijakan kepala sekolah ditegakkan secara konsisten, maka nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, integritas, dan kerja sama akan terinternalisasi menjadi kebiasaan positif peserta didik.

Dengan demikian, penguatan regulasi kebijakan kepala sekolah di SMP merupakan strategi fundamental dalam membangun karakter peserta didik. Regulasi yang jelas, sistematis, dan berbasis nilai akan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi perkembangan moral dan sosial peserta didik. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan memiliki peran sentral dalam memastikan kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu membangun budaya sekolah yang berkarakter dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pendidikan nasional di era kontemporer.

Pendidikan karakter menjadi sorotan utama dalam dunia pendidikan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai laporan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan karakter peserta didik di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan dan belum optimal (misalnya rendahnya disiplin, kurangnya tanggung jawab sosial, serta perilaku yang kurang sopan). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program pendidikan karakter telah digagas secara nasional, implementasinya di tingkat sekolah belum sepenuhnya efektif dan merata.

Berdasarkan hasil penelitian di beberapa sekolah menengah pertama, banyak kepala sekolah yang belum secara konsisten memperkuat regulasi kebijakan yang mendukung pendidikan karakter. Misalnya, beberapa SMP hanya memiliki peraturan tata tertib yang bersifat administratif belaka tanpa adanya mekanisme implementasi dan evaluasi yang jelas terhadap aspek nilai karakter seperti tanggung jawab, integritas, dan kerja sama. Kondisi ini menyebabkan

kebijakan yang ada tidak benar-benar menjadi pedoman dalam perilaku dan pembiasaan siswa sehari-hari.

Selain itu, studi empiris di lapangan menunjukkan bahwa guru dan tenaga kependidikan seringkali mengalami kebingungan dalam menerapkan aturan karakter karena kebijakan yang ada kurang komprehensif dan tidak disosialisasikan dengan baik. Banyak guru yang merasa belum mendapatkan pedoman operasional yang jelas tentang bagaimana mengintegrasikan nilai karakter dalam setiap aktivitas pembelajaran dan kegiatan sekolah.

Fenomena lain yang sering ditemukan adalah lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi. Bahkan ketika kebijakan telah ditetapkan, pelaksanaannya cenderung tidak berkelanjutan. Akibatnya, pembiasaan nilai karakter yang menjadi tujuan utama pendidikan karakter tidak berkembang menjadi kebiasaan yang melekat kuat pada peserta didik. Begitupula dari laporan kepala sekolah dan guru yang menyatakan bahwa pembinaan karakter siswa seringkali terhambat oleh kurangnya sumber daya, waktu, dan dukungan sistemik dari sekolah. Misalnya, kegiatan pembiasaan karakter seperti apel pagi berbasis nilai, program mentoring oleh guru teladan, atau pelatihan kemandirian siswa seringkali hanya dilaksanakan sesekali dan tidak menjadi bagian dari budaya sekolah.

Secara lebih spesifik, penguatan regulasi kebijakan kepala sekolah terbukti mampu memberikan dampak positif terhadap pembentukan karakter peserta didik apabila dilakukan dengan strategi yang kuat dan konsisten. Di beberapa SMP yang telah berhasil, kepala sekolah melakukan pembaruan peraturan yang jelas

dan melibatkan guru, siswa, serta komite sekolah dalam proses penyusunan kebijakan. Selain itu, terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur sehingga setiap aspek karakter yang dibangun dapat diukur dan dikembangkan dari waktu ke waktu.

Begitupula dengan kondisi yang terjadi di SMP Negeri 5 Tasikmalaya, di mana penguatan regulasi kebijakan kepala sekolah dalam membangun karakter peserta didik belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan konsisten sebagaimana yang diharapkan. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam praktik keseharian di lingkungan sekolah, seperti kurangnya kedisiplinan, lemahnya kepatuhan terhadap tata tertib, serta belum terbentuknya kebiasaan positif yang mengakar dalam diri peserta didik. Situasi tersebut menunjukkan bahwa regulasi dan kebijakan yang telah dirumuskan sebenarnya telah tersedia secara normatif, namun dalam implementasinya belum mampu menginternalisasi nilai-nilai karakter secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selain itu, belum maksimalnya sinergi antara kebijakan, keteladanan, serta pengawasan juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pembentukan budaya sekolah yang berkarakter. Dengan demikian, kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara rumusan kebijakan dan realitas pelaksanaannya, sehingga diperlukan penguatan strategi, konsistensi penerapan, serta komitmen seluruh warga sekolah agar regulasi yang telah ditetapkan benar-benar mampu membangun budaya sekolah yang mencerminkan nilai-nilai karakter secara nyata dan berkesinambungan.

Berikut adalah penyajian permasalahan secara kuantitatif dalam bentuk tabel berdasarkan hasil observasi awal, dokumentasi sekolah, di SMP Negeri 5 Tasikmalaya untuk menunjukkan tingkat optimalisasi penguatan regulasi kebijakan kepala sekolah dalam membangun karakter peserta didik.

Tabel 1.1
Identifikasi Permasalahan Penguatan Regulasi Kebijakan Kepala Sekolah di SMP Negeri 5 Tasikmalaya

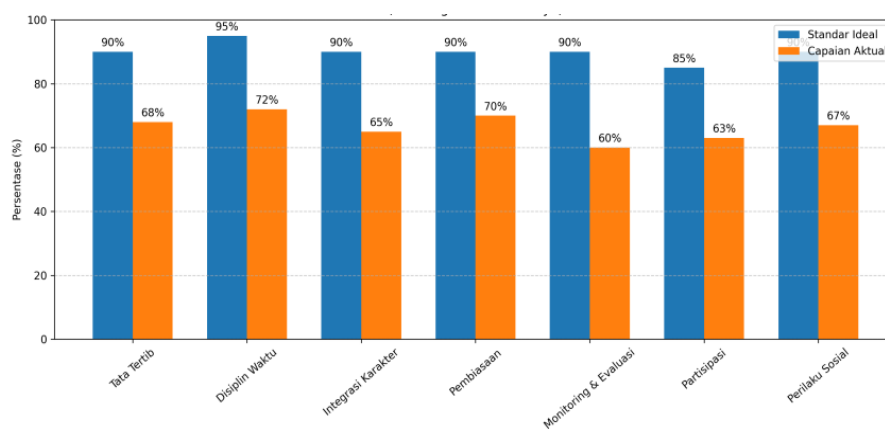
No	Aspek yang Dinilai	Indikator	Standar Ideal (%)	Capaian Aktual (%)	Kategori
1	Penegakan Tata Tertib	Kepatuhan siswa terhadap aturan sekolah	90	68	Cukup
2	Disiplin Waktu	Ketepatan hadir dan mengikuti kegiatan	95	72	Cukup
3	Integrasi Nilai Karakter dalam Pembelajaran	Guru mengintegrasikan nilai karakter dalam RPP	90	65	Kurang
4	Pembiasaan Karakter	Konsistensi kegiatan pembiasaan (apel, literasi, dll.)	90	70	Cukup
5	Monitoring dan Evaluasi	Evaluasi berkala terhadap program karakter	90	60	Kurang
6	Partisipasi Warga Sekolah	Keterlibatan guru dan komite dalam penyusunan regulasi	85	63	Kurang
7	Perilaku Sosial Siswa	Sikap saling menghargai dan tanggung jawab	90	67	Cukup

Sumber : Observasi awal di SMPN 5 Tasikmalaya, 2026

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa seluruh aspek penguatan regulasi kebijakan kepala sekolah belum mencapai standar ideal yang ditetapkan ($\geq 85-95\%$). Kesenjangan tertinggi terdapat pada aspek monitoring dan evaluasi program karakter (30%), yang menunjukkan lemahnya sistem pengawasan terhadap implementasi kebijakan. Selain itu, integrasi nilai karakter dalam

pembelajaran serta partisipasi warga sekolah juga masih berada dalam kategori “kurang”.

Dari data tersebut apabila disajikan dalam bentuk grafik Permasalahan Penguatan Regulasi Kebijakan Kepala Sekolah di SMPN 5 Tasikmalaya adalah sebagai berikut :



Gambar 1
Permasalahan Penguatan Regulasi Kebijakan Kepala Sekolah
di SMPN 5 Tasikmalaya

Data tersebut menunjukkan bahwa regulasi kebijakan kepala sekolah belum sepenuhnya terimplementasi secara sistematis dan konsisten. Meskipun beberapa program pembinaan karakter telah berjalan, efektivitasnya masih terbatas karena belum didukung oleh sistem evaluasi yang kuat dan komitmen kolektif yang menyeluruh.

Dengan demikian, secara empiris bahwa penguatan regulasi kebijakan kepala sekolah di SMP Negeri 5 Tasikmalaya masih memerlukan perbaikan pada aspek perencanaan, implementasi, dan pengawasan agar mampu membangun karakter peserta didik secara optimal dan berkelanjutan. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa regulasi kebijakan yang ada

memerlukan penguatan, baik dari aspek perumusan, implementasi, maupun evaluasi. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjadi instrumen pembentukan karakter melalui pembiasaan yang konsisten, keteladanan, serta sistem pengawasan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, fenomena di atas menunjukkan bahwa upaya penguatan regulasi kebijakan kepala sekolah dalam membangun karakter peserta didik masih menghadapi berbagai kendala di tingkat operasional. Kondisi ini menegaskan perlunya perhatian yang lebih besar terhadap penyusunan, implementasi, dan evaluasi regulasi kebijakan yang benar-benar berbasis pada kebutuhan nyata sekolah serta mendukung terciptanya budaya sekolah yang berkarakter. Tanpa penguatan regulasi yang memadai, pendidikan karakter di SMP berisiko tetap menjadi program normatif tanpa dampak nyata terhadap perubahan perilaku peserta didik.

Apabila dibandingkan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu maka kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi antara aspek kebijakan, praktik kepemimpinan, dan dinamika budaya sekolah dalam satu kerangka analisis yang utuh, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai bagaimana kebijakan kepala sekolah diimplementasikan secara kontekstual dan berkelanjutan dalam membangun karakter peserta didik.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam karya tulis berbentuk tesis

dengan judul : “Penguatan Regulasi Kebijakan Kepala Sekolah dalam Membangun Karakter Peserta Didik (Studi Kasus di SMP Negeri 5 Tasikmalaya)”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penelitian ini difokuskan pada dilihat dari beberapa aspek yaitu :

1. Aspek Perumusan Regulasi Kebijakan Kepala Sekolah

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana proses penyusunan, penguatan, serta landasan normatif dan filosofis kebijakan kepala sekolah dalam membangun karakter peserta didik di SMP Negeri 5 Tasikmalaya. Aspek ini mencakup keterlibatan warga sekolah, kesesuaian dengan regulasi nasional, serta integrasi visi dan misi sekolah dalam kebijakan yang ditetapkan.

2. Aspek Implementasi Regulasi dalam Pembentukan Karakter

Fokus ini menelaah bagaimana kebijakan yang telah dirumuskan diimplementasikan dalam praktik keseharian sekolah, baik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Termasuk di dalamnya pembiasaan, keteladanan, penegakan tata tertib, serta integrasi nilai karakter dalam proses pembelajaran.

3. Aspek Evaluasi dan Penguatan Berkelanjutan

Penelitian ini juga mengkaji bagaimana monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut dilakukan untuk memastikan efektivitas kebijakan dalam membangun

karakter peserta didik. Aspek ini mencakup identifikasi hambatan, strategi perbaikan, serta upaya penguatan budaya sekolah secara berkelanjutan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian tersebut di atas maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam membangun karakter peserta didik di SMP Negeri 5 Tasikmalaya?;
2. Apa saja aspek penguatan implementasi kebijakan kepala sekolah dalam membangun karakter peserta didik di SMP Negeri 5 Tasikmalaya ?;
3. Bagaimana pengembangan penguatan regulasi kebijakan kepala sekolah dalam membangun karakter peserta didik di SMP Negeri 5 Tasikmalaya?.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan kepala sekolah dalam membangun karakter peserta didik di SMP Negeri 5 Tasikmalaya;
2. Untuk mengetahui aspek penguatan implementasi kebijakan kepala sekolah dalam membangun karakter peserta didik di SMP Negeri 5 Tasikmalaya;
3. Untuk mengetahui pengembangan penguatan regulasi kebijakan kepala sekolah dalam membangun karakter peserta didik di SMP Negeri 5 Tasikmalaya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan diperoleh kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya ruang lingkup penguatan regulasi kebijakan kepala sekolah dalam membangun karakter peserta didik;
- b. Menambah kepustakaan dalam bidang manajemen sistem pendidikan di Program Magister Universitas Galuh;
- c. Dapat dijadikan sebagai referensi dan masukan serta memberikan informasi kepada peneliti berikutnya untuk menindaklanjuti atau mengembangkan pada penelitian sejenis.

2. Secara Praktis

- a. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang penguatan regulasi kebijakan kepala sekolah dalam membangun karakter peserta didik;
- b. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan regulasi kebijakan kepala sekolah dalam membangun karakter peserta didik;
- c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi SMP Negeri 5 Tasikmalaya sehubungan dengan penguatan regulasi kebijakan kepala sekolah dalam membangun karakter peserta didik.